

PENGEMBANGAN PUD KARANGANYAR Intanpari Tambah Wahana Baru



KR-Abdul Alim

Proses pembuatan waterboom di bawah roller coaster kolam renang Intanpari Karanganyar.

KARANGANYAR (KR) - Perusahaan Umum Daerah (PUD) Aneka Usaha Kabupaten Karanganyar menambah wahana roller coaster di area kolam renang Intanpari, dengan anggaran sekitar Rp 1,5 miliar. Diprediksikan, wahana baru tersebut akan menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung.

Bupati Karanganyar Juliyatmono mengatakan membenahan dan penambahan wahana di kawasan Edupark Intanpari akan mendongkrak pengunjung.

Edupark Intanpari akan menjadi tujuan wisata di Karanganyar. Terlebih lokasinya berada di tengah kawasan perkotaan Kabupaten Karanganyar.

"Di Edupark Intanpari ada kolam renang anak dan dewasa. Kita juga siapkan kolam renang khusus putri. Sekarang kita tambah lagi roller coaster," jelasnya, Selasa (22/11).

Pembangunan sarana roller coaster masih tahap uji coba kelayakan oleh instansi terkait. Jika lolos, roller coaster tersebut segera dioperasikan.

Bupati menargetkan wahana roller coaster beroperasi Desember atau sebelum pergantian tahun baru. Ia ingin wahana roller coaster menjadi magnet baru, selain kolam renang dan pesawat terbang.

Direktur Umum Perusahaan (PUD) Aneka Usaha Karanganyar, Samidi mengatakan sebelum dioperasikan akan ada sertifikasi kelayakan dan keamanan wahana tersebut, yang diterbitkan lembaga khusus.

Pihaknya akan memastikan dulu keselamatan dan kelayakan operasionalnya. "Sebelum dinyatakan layak dan aman beroperasi, sudah ada sertifikatnya dan lolos uji kelayakan. Kolam renang yang ada juga sudah digunakan event bertaraf internasional," tandasnya. (Lim)-f

BUPATI SUKOHARJO BUKA LARWASDA 2022

Pengawasan Jadi Aspek Pengendalian

SUKOHARJO (KR) - Bupati Sukoharjo Etik Suryani membuka rapat dinas Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda), Selasa (22/11) di Hotel Grand Mercure Solo Baru Grogol.

Ia menyebut pengawasan menjadi salah satu aspek pengendalian yang sangat penting, agar penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah senantiasa berada pada jalur yang benar atau *on the track*.

Etik Suryani juga mengingatkan, penyelenggaraan pemerintahan di Pemkab Sukoharjo harus sesuai visi dan misi serta sejalan de-

ngan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Inspektorat selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) mempunyai fungsi controlling dan bertugas membantu pimpinan daerah untuk memastikan kegiatan-kegiatan organisasi telah dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku.

Menurutnya, kegiatan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pengawasan yang telah dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Sukoharjo pada periode tahun pengawasan sebelumnya.

Rapat Larwasda tahun ini juga akan memaparkan

hasil pengawasan tahun 2019, 2020 dan 2021. "Selain itu, kegiatan ini merupakan upaya kita bersama untuk mendukung akselerasi pemerintahan yang baik dan bersih, *good Governance and clean government*," tandas Etik Suryani.

Disebutkan, pengawasan akan berhasil dan berarti ketika rekomendasi hasil pemeriksaan ditindaklanjuti dengan baik oleh audit atau objek pemeriksaan. Artinya, pengawasan tidak akan ada artinya jika rekomendasi hasil pemeriksaan tidak dapat atau tidak ditindaklanjuti.

"Oleh sebab itu, kepada para pimpinan perangkat

daerah, camat, kepala desa, kepala sekolah, serta unit kerja yang lain, saya mengimbau untuk segera menindaklanjuti rekomen-

dasi hasil pemeriksaan dan memastikan kesalahan atau penyimpangan tidak terjadi lagi atau terulang," tandasnya. (Mam)-f



KR-Wahyu Imam Ibad

Bupati Sukoharjo Etik Suryani saat membuka Larwasda.

'GERBANG EMAS' DI TEMANGGUNG

Desa Jadi Subjek Pembangunan

TEMANGGUNG (KR) - Pemerintah Kabupaten Temanggung mencanangkan inovasi pembangunan melalui program Gerbang Emas, untuk percepatan pemulihan ekonomi masyarakat Temanggung setelah pandemi Covid-19. Kepala Bidang PEIPD Bappeda Kabupaten Temanggung, Woro Pratiwi Setyorini mengatakan program Gerbang Emas yakni membangun desa pinggir yang berdaya saing dengan tujuan peningkatan kesehatan, pelestarian lingkungan dan pemulihan ekonomi masyarakat.

"Melalui Gerbang Emas, desa menjadi subjek pembangunan, bukan lagi menjadi objek, sehingga desa diharapkan untuk bisa berdaya saing tinggi dalam membangun wilayahnya sendiri dengan kekuatan potensi kearifan lokal yang dimiliki," kata Woro, baru-baru ini.

Untuk mendukung program tersebut, lanjut Woro, Pemkab Temanggung bersama semua stakeholder akan bersinergi dalam mendorong, memotivasi dan memfasilitasi pembangunan desa pinggir agar menjadi lebih produktif. Fokus Gerbang Emas adalah dimensi pembangunan berkelanjutan yang terdiri dari empat pilar. Yaitu ekonomi, sosial, lingkungan dan kelembagaan, untuk peningkatan

produktivitas ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Selain itu, juga peningkatan kualitas kesehatan tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan, sehingga terwujud sumber daya manusia berdaya saing, akselerasi ekonomi dan respon terhadap perubahan iklim. Gerbang Emas juga merupakan salah satu advokasi pimpinan daerah dalam menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan daerah. Sebagai progres Gerbang Emas, November ini dilakukan monitoring dan evaluasi, baik secara online maupun offline.

Kepala Bappeda Kabupaten Temanggung, Dwi Sukarnei mengatakan masyarakat juga perlu membuat inovasi dan menciptakan kreasi-kreasi baru secara perorangan maupun lembaga. Inovasi dimaksud sebagai upaya meningkatkan daya saing untuk memulihkan perekonomian masyarakat Temanggung. "Stakeholder yang hadir dalam koordinasi Gerbang Emas sudah punya komitmen untuk menyelesaikan program tersebut, sesuai spesialisasi masing-masing. "Semua bertekad meningkatkan kesejahteraan masyarakat Temanggung," ungkapnya. (Osy)-f

PEMILU 2024 DI WONOGIRI

Butuh 125 Anggota PPK

WONOGIRI (KR) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Wonogiri mengundang warga daerah setempat untuk menjadi garda terdepan pelaksanaan Pemilu Serentak 2024. KPU resmi membuka pendaftaran calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Ditargetkan, dari 25 kecamatan di Kabupaten Wonogiri akan muncul 125 anggota karena setiap kecamatan membutuhkan tiga anggota PPK.

"Pendaftaran dibuka mulai 20 sampai 29 November 2022," kata Agustina Puspa Dewi SE MM, Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM KPU Wonogiri dalam rilisnya, Rabu (23/11). Menurutnya, pendaftar bisa mandiri secara online melalui aplikasi Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIKBA): <https://siakba.kpu.go.id/login>.

Calon anggota PPK juga bisa mengisi data pendaftaran dan mengunggah persyaratan secara digital dengan membuat akun terlebih dahulu. Caranya, dengan memasukkan nama, email, NIK serta password untuk bisa melakukan login di SIAKBA.

"Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi calon anggota PPK tertuang dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2022 Pasal 35, Jelas Agustina. Dalam waktu berdekatan, KPUD Wonogiri juga segera membentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat desa pada 18 Desember 2022. Dibutuhkan 882 anggota PPS. Untuk 294 desa/kelurahan di Kabupaten Eonogiri, masing-masing membutuhkan tiga personel. (Dsh)-f

HUKUM

KENALAN LEWAT MEDSOS

Teman Baru Gondhol Motor dan Uang

WONOSARI (KR) - Kartika Ratna (21) warga Senden Ngabeyan, Karanganyar Klaten, menjadi korban penipuan teman pria yang baru dikenalnya melalui media sosial. Atas kejadian tersebut sepeda motor Honda Vario Nopol AD 44-38 AMC berikut HP dan STNK kendaraan dibawa lari kenalan barunya.

Kapolsek Playen, AKP Hajar Wahyudi, Rabu (23/11), mengungkapkan beberapa waktu lalu Kartika berkenalan dengan YPY (27) warga Kapanewon Semanu. Perkenalannya melalui medsos tersebut YPY mengaku bernama Reza.

"Keduanya pun intens berkomunikasi dan akhirnya sepakat untuk bertemu. Korban diminta untuk menjemput YPY di Blendangan Tegaltirto Berbah," jelasnya.

Pemintaan YPY itu akhirnya dituruti dan korban akhirnya menjemput YPY di Tegaltirto Berbah Sleman. Setelah itu, keduanya kemudian menuju pantai di Gunungkidul dengan berboncengan motor milik korban. Namun sampai di Jalan Playen-Paliyan tepatnya di depan SMAN

1 Playen, ban motor tersebut kempes.

Kartika kemudian turun dari kendaraan sementara YPY mengendarai sepeda motor dan beralasan mencari tambal ban. "Tapi pelaku justru langsung pergi menggunakan kendaraan milik korban dan tidak kembali lagi," imbuhnya.

Dari pengakuan korban di dalam jok motor selain terdapat STNK, HP juga dompet berisi sejumlah uang. Ditunggu hingga beberapa saat pelaku tetap tidak kembali dan sadar menjadi korban kejahatan Kartika kemudian melaporkan kejadian ini ke Polsek Playen.

Tak berselang lama, petugas berhasil mengantongi identitas lengkap YPY yang semula mengaku bernama Reza. Petugas kemudian berkoordinasi dengan reskrim Depok Timur untuk memburu pria tersebut.

Akhirnya berhasil diamankan berikut dengan barang bukti kejahatan yang dilakukannya. "Tersangka sudah kami bekuk dan kini menjalani proses hukum," terangnya. (Bmp)-f

Melawan Arus, Pelajar Tewas Laka Lantas

SLEMAN (KR) - Belum genap sepekan, kecelakaan maut kembali terjadi di wilayah hukum Polresta Sleman, Rabu (23/11) pagi. Korban meninggal dalam kecelakaan di Jalan Siliwangi tepatnya utara simpang empat Demak Ijo Nogosaren, Nogotirto Gamping, adalah pelajar warga Sleman berinisial AAB (16).

Kecelakaan melibatkan motor yang dikemudikan korban, dengan mobil Toyota Hiace AB 7224 NB. Kani Gakkum Satlantas Polresta Sleman, Iptu Catur Bowo Laksono, membenarkan AAB meninggal usai mengalami kecelakaan.

"Korban AAB mengalami luka cedera kepala berat, patah tulang lengan tangan kanan dan pergelangan tangan kiri. Ia meninggal di TKP, kemudian dievakuasi ke RSUD Dr Sardjito," ungkapnya.

Dijelaskan, kejadian bermula saat korban yang saat itu mengendarai motor Honda Scoopy AB 6421 ZX, dari arah barat sekitar pukul 05.45 WIB. Pelajar tersebut melaju melawan arus ke selatan, bermaksud menyeberang jalan ke arah timur.

Sesaat sebelum terjadinya kecelakaan, dari arah selatan ke utara melaju mobil Toyota Hiace AB 7224

Akibatnya, korban AAB mengalami luka cidera kepala berat, patah tulang lengan tangan kanan dan pergelangan tangan kiri. Kecelakaan juga mengakibatkan motor yang dikemudikan korban rusak body depan dan samping ringsek, sedangkan Hiace rusak bumper depan.

"Kasus kecelakaan itu sudah dalam penanganan Satlantas Polresta Sleman. Kami mengimbau, agar masyarakat berhati-hati dan selalu tertib dalam berlalu lintas," pungkasnya. (Ayu)-f



KR-Dok Satlantas Polresta Sleman

Polisi melakukan olah TKP laka lantas yang menewaskan seorang pelajar.

PEMOHON EKSEKUSI DIBERI WAKTU 30 HARI

Oncan: Aneh, Panitera Ancam Coret Permohonan

YOGYA (KR) - Meski perkaranya telah dimenangkan oleh pengadilan hingga Mahkamah Agung dan mempunyai putusan hukum tetap, tapi pemohon eksekusi Veronica Lindayati Lokasari belum bisa menerima haknya. Permohonan eksekusi yang diajukan sejak 2,5 tahun lalu belum juga dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri (PN) Yogya.

Justru pada 28 Oktober 2022, pemohon eksekusi mendapat surat dari panitera PN Yogya yang meminta fotocopy sertipikat objek yang akan dieksekusi. Jika fotocopy itu tidak diserahkan dalam waktu 30 hari, register permohonan eksekusi terancam dicoret. Hal itu tentu mengherankan pemohon eksekusi dan kuasa hukumnya yang terdiri dari Oncan Poerba SH, Willyam H Saragih SH dan FX Yoga Nugrahanto SH.

Oncan Poerba kepada wartawan, Rabu (23/11), mengungkapkan isi surat dari panitera itu aneh. "Padahal mereka tahu objek tanah dan bangunan yang akan dieksekusi lelang, telah disita oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap," jelasnya.

Putusan Perkara yang dimaksud adalah sebagaimana dalam perkara perdata No 73/Pdt.G/2016/PN.Yyk jo No 33/PDT/2017/PT.YYK jo No 3450 K/Pdt/2017 jo No 491 PK/Pdt/2019 yang telah berkekuatan hukum tetap. Perkara itu berawal dari masalah utang piutang sebesar Rp 2,7 miliar.

"Permohonan eksekusi telah diajukan lebih dari 2,5 tahun lamanya dan pemohon eksekusi tidak pernah menerima surat per-

mohonan fotocopy sertipikat dari PN Yogya sebelumnya. Lagi pula fotocopy sertipikat dan objek tanah dan bangunan bukanlah milik pemohon eksekusi, melainkan milik termohon eksekusi yakni Denny Wahyudi dan Lia Puspita, yang akan dilakukan lelang eksekusi," jelasnya.



KR-M Fauzi

Oncan Poerba bersama tim.

Oleh karena itu, alasan pengadilan meminta fotocopy sertipikat dari pemohon eksekusi atas objek tanah yang akan dilakukan lelang, adalah alasan yang tidak masuk akal dan dicari-cari. Terlebih tindakan panitera PN Yogya yang mengancam akan mencoret permohonan register eksekusi, hal ini jelas-jelas bertentangan dengan hukum dan mengada-ada serta tidak ada dasar hukumnya. Karena Surat Dirjen Badilum, yang dijadikan dasar oleh Panitera untuk melakukan pencoretan register eksekusi, tidak pernah mensyaratkan tentang mengharuskan adanya kelengkapan sertifikat/fotocopy sertifikat Hak Milik/HGB atas tanah milik pemohon eksekusi sebagai syarat agar KJPP bisa melakukan penilaian atau perhitungan atas objek eksekusi lelang.

"Dengan fakta-fakta itulah, kami mohon kepada Ketua PN Yogya agar melaksanakan eksekusi yang diajukan oleh pemohon eksekusi, karena tidak ada alasan hukum yang membuat fotocopy sertipikat harus dimiliki pemohon eksekusi dan diserahkan kepada PN Yogya, terlebih lagi objek tanah dan bangunan yang akan dilakukan lelang eksekusi telah diletakkan sita jaminan dalam perkara yang telah berkekuatan hukum tetap," tegas Oncan.

Bahkan perkara eksekusi ini telah melewati perkara perlawanan eksekusi yang diajukan oleh termohon eksekusi di PN Yogya, yang hasilnya perlawanan tersebut tetap ditolak oleh pengadilan hingga Mahkamah Agung RI, sebagaimana dalam perkara perdata Perlawanan No 167/Pdt.Bth/2020/PN.Yyk jo No 50/PDT/2021/PT.YYK jo No 878.K/Pdt/2022. (Zie)-f